

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ariyani, R. (2014). Dilema Orientasi Pasar vs Pembangunan Berkelanjutan : Logika Dibalik Permasalahan Kegagalan Kebijakan: Studi Evaluasi Implementasi Kebijakan Normalisasi Sungai Gendol Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010. *Electronic Thesis & Dissertation Universitas Gadjah Mada*.
- Humaedi, Sahadi., Budi Wibowo., & Santoso Raharjo. (2020). Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 61-72. DOI: 10.24198/share.v10i1.26896.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2005). *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203010167>.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2013). *Building and using the theory of collaborative advantage*. In: Keast, Robyn; Mandell, Myrna P. and Agranoff, Robert eds. *Network Theory in the Public Sector: Building New Theoretical Frameworks*. New York: Routledge, pp. 51–69.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2010). *Introducing The Theory of Collaborative Advantage*. In: Osborne, S.P. (Ed.). (2009). *The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance* (1st ed.). New York: Routledge, pp. 163-184. <https://doi.org/10.4324/9780203861684>.
- International Institute for Democracy and Assistance. (2018). *IDEA Strategy 2018-2022*. Stockholm: International IDEA, pp 1-36.
- Komnas HAM RI. (2022). *Laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Serentak 2024*. Diakses dari Komnasham.go.id

Komnas HAM RI. (2019). *Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*.

KOMNAS HAM RI: Jakarta Pusat.

Marshall, P. (2015). Book Review C. Behan, *Citizen Convict: Prisoners, Politics and the Vote*.

European Journal of Probation, 7(1), 76-79.

Mauludini, A. (2020). Kolaborasi Dan Konflik Antar Badan Penyelenggara Pemilu Dalam Kerja Kelembagaan (Institutional Work). *Jurnal KPU*, 2(2), 215-239.

Mufti, D. N. (2019). Menyelamatkan Hak Pilih Orang Yang Sakit Re-Design Penjaminan Hak Pilih Untuk Pasien Rumah Sakit Sebagai Upaya Mencapai Pemilu Yang Inklusif. *Electronic Thesis & Dissertation Universitas Gadjah Mada*.

Nugroho, K. & Ferry Daud Liando. (2019). *Nilai dan asas pemilu*. Dalam Sukmajati, *et al. Tata kelola pemilu di indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: Jakarta Pusat.

Wibowo, A. E. (2017). Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 bagi Warga Binaan Pemasyarakatan asal Kabupaten Kulon Progo di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta). *Electronic Thesis & Dissertation Universitas Gadjah Mada*.

Partono. (2019). Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi DKI Jakarta. *Journal KPU*, 1-18.

Penal Reform International. (2016). The right of prisoners to vote: a global overview. Diakses dari: https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/08/The-right-of-prisoners-to-vote_March-2016.pdf.

Phan, H.T., Rivas, J., & Song, T. (2011). *Collaboration: a Literature Review Research Report*.

Puspita, R. (2021). Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan Publik. *Dharmasiswa*, Vol. 1 , Artikel 37.

- Rahmayani., Burhanuddin., & Prianto, L. (2019). Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Majene. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(1). 63-78.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33). 81-95.
- Saleh, C. (tanpa tahun). Modul Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. Diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf>.
- Sandra Amalia, L. (2019). Evaluasi Carut Marut Data Kependudukan Bahan Penetapan DPT Pemilu Serentak 2019. *Jurnal KPU*. 1-16.
- Sarantakos, S. (2013). *Social research*. Palgrave Macmillan: Basingstoke.
- Sari, F. A. (2020). Pemilu Inklusif Di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus Pemenuhan Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Sleman Yogyakarta pada Pemilu 2019. *Electronic Thesis & Dissertation Universitas Gadjah Mada*.
- Surbakti, R. (2018). Pemilu Inklusif. Diakses dari https://aipi.or.id/assets/pdf/pdf_file/12022018_Pemilu_Inklusif_Ramlan_Surbakti.pdf
- Sili Teka, S. (2021). Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada (Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 1-27.
- Vanderstoep, S. W., & Johnson, D. D. (2008). *Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches* (Vol. 32). John Wiley & Sons.
- Wulan Dhani, F. (2019). Pelaksanaan Pemilu 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Banjarbaru Studi tentang Upaya Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Tahanan/Narapidana dalam Perspektif Kesetaraan antar Warga Negara. *Repository Universitas Airlangga*.

Peraturan

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).*

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right).*

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*

Pemerintah Indonesia. *Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.*

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*

Pemerintah Indonesia. *Peraturan KPU Nomor 9 Tahun tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.*

Pemerintah Indonesia. *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Pemerintah Indonesia. *PKPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Pemerintah Indonesia. *Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Pemerintah Indonesia. *Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.*

Website

Antaranews. (2019, April 23). *168 Warga Binaan di Lapas Narkoba Tidak Terdaftar sebagai Pemilih.* Diakses dari <https://jogja.antaranews.com/berita/373488/168-warga-binaan-di-lapas-narkotika-tidak-terdaftar-sebagai-pemilih>.

Antaranews. (2019, April 16). *40 Warga Binaan Lapas Wirogunan Tak Bisa Memilih.* Diakses dari <https://jogja.antaranews.com/berita/373933/40-warga-binaan-lapas-wirogunan-tak-bisa-memilih>.

Detik.com. (2023, Mei 13). *LGBTQ Hingga Napi, Ini 17 Kelompok di Pemilu Versi Komnas HAM.* Diakses dari: <https://news.detik.com/pemilu/d-6718454/lgbtq-hingga-napi-ini-17-kelompok-rentan-di-pemilu-versi-komnas-ham>.

Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta. (tanpa tahun). *Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.* Diakses dari: <https://dindukcapil.jogjakota.go.id/page/index/kedudukan-dan-tupoksi>.

Kompas. (2022, Februari 1). *Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM.* Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->.

Kompas. (2018, Februari 28). *Jadwal dan Tahapan Pemilu 2019.* Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=all>

- Kompas. (2019, April 4). *Komnas HAM Sebut Pemenuhan Hak Pemilih di Rutan dan Lapas Masih Ada yang Bermasalah*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/17024681/komnas-ham-sebut-pemenuhan-hak-pemilih-di-rutan-dan-lapas-masih-ada-yang>.
- Mediacenter Batam. (2018, November 29). *Pindah TPS Potensi Kurangi Hak Pilih*. Diakses dari <https://mediacenter.batam.go.id/2018/11/29/pindah-tps-potensi-kurangi-hak-pilih/>.
- Rahman. (2019, Februari 11). *KPU Kota Yogyakarta Gelar Sosialisasi Pemilu 2019 di Lapas Wirogunan*. Diakses dari <https://gudeg.net/read/12599/kpu-kota-yogyakarta-gelar-sosialisasi-pemilu-2019-di-lapas-wirogunan.html>.
- Rahman. (2019, April 11). *Lapas II A Wirogunan Gelar Simulasi Pencoblosan Pemilu*. Diakses dari <https://gudeg.net/read/13028/lapas-ii-a-wirogunan-gelar-simulasi-pencoblosan-pemilu.html>.
- Ruwayari, V. (2022, April 9). *Kendala Pemutakhiran Data Pemilu*. Diakses dari <https://kab-sarmi.kpu.go.id/berita/baca/7800/kendala-pemutakhiran-data-pemilu-2024>.
- Suara.com. (2022, April 6). *KPU Ungkap Kesulitan Pemutakhiran Data Pemilih Lapas, Komisioner KPU: Biasanya Penghuni Lapas Hilangkan Identitasnya*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2022/04/06/205415/kpu-ungkap-kesulitan-pemutakhiran-data-pemilih-lapas-komisioner-kpu-biasanya-penghuni-lapas-hilangkan-identitasnya?page=all>.
- Suara Rakyat. (2022, September 19). *Carut Marut Data Pemilih Pemilu*. Diakses dari <https://suaraaksirakyat.com/carut-marut-data-pemilih-pemilu-2024/>.
- Wahyudi, A. (2023, Februari 6). *Problematisasi Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum*. Diakses dari <https://demak.bawaslu.go.id/problematisasi-daftar-pemilih-dalam-pemilihan-umum/>.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Kolaborasi dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan Studi Kasus: Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019

Nur Ahmad Dzulkirom, Dr. Amalinda Savirani, S.I.P., M.A.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Wall, A. (2007, Mei 11). *Voting Facilities for Prisoners*. Diakses dari

<https://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/462474428#734997532>.